

Program Prioritas BSPS Dalam Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Kemasrindo, Kertapati Kota Palembang

Yustin Patria Primordia¹; Nita Astasya¹; Syeilla Nadira Ikhwan¹; Dinda Alya Shafira¹; Suci Orian Sari¹; Ani Firda^{2*})

1. Balai Pelaksana dan Penyediaan Perumahan Sumatera V, Palembang, Sumatera Selatan 30114, Indonesia
2. Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Tridinanti, Palembang, Sumatera Selatan 30129, Indonesia

**)Email: ani.firda@gmail.com*

Received: 3 Mei 2023 | Accepted: 3 Mei 2023 | Published: 31 Mei 2023

ABSTRACT

The purpose of this study is to be able to find out how the implementation of the BSPS Program affects the handling of RTLH and Extreme Poverty in Kemas Rindo Village, Kertapati District, Palembang City. The data used is secondary data from BKKBN. The data is RTLH data in Palembang City precisely during 2022. Furthermore, the data is analyzed using quantitative descriptive analysis which will later show the distribution of RTLH in the city of Palembang. Other supporting data was obtained based on the Documentation of Kemas Rindo Village Based on the Type and Number of Livelihoods of residents in the Kemas Rindo Village environment, Kertapati District, Palembang City. The results of the discussion that have been presented are related to how the implementation stages of the BSPS Program in Kemas Rindo Village have run well, as evidenced by the development of 53 Habitable Self-Help Housing Units. Then, related to infrastructure, a 917-meter environmental road has also been made for community travel access in Kemas Rindo Village. The completion of RTLH and Extreme Poverty is a manifestation of the Government's concern in alleviating poverty for MBR and it is hoped that this assistance can be felt by all people in need.

Keywords: *Housing programs, Uninhabitable house, Extreme Poverty, low income society*

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untu dapat mengetahui bagaimana pengaruh pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Rumah Swadaya (BSPS) dalam penanganan terhadap rumah tidak layak huni (RTLH) dan Kemiskinan Ekstrem di Kelurahan Kemas Rindo, Kecamatan Kertapati Kota Palembang. Data yang digunakan merupakan data sekunder yg berasal dari BKKBN. Data tersebut merupakan data RTLH yang ada di Kota Palembang tepatnya selama tahun 2022. Selanjutnya data tersebut di analisis menggunakan analisa deskriptif kuantitatif yang nantinya akan menunjukkan sebaran RTLH di kota Palembang. Data pendukung lainnya didapatkan berdasarkan Dokumentasi Kelurahan Kemas Rindo Berdasarkan Jenis dan Jumlah Mata Pencarian penduduk di lingkungan Kelurahan Kemas Rindo, Kecamatan Kertapati Kota Palembang. Hasil dari pembahasan yang telah dipaparkan berkaitan dengan bagaimana tahapan implementasi pelaksanaan Program BSPS ini di Kelurahan Kemas Rindo sudah berjalan dengan baik terbukti dengan telah dibangun 53 Unit Rumah Swadaya Layak Huni. Kemudian, berkaitan dengan sarana prasarana juga sudah dibuatkan jalan lingkungan sepanjang 917meter untuk akses perjalanan masyarakat di Kelurahan Kemas Rindo. Penuntasan RTLH dan Kemiskinan Ekstrem menjadi wujud kepedulian Pemerintah dalam

menuntas kemiskinan untuk MBR dan diharapkan bantuan ini bisa dirasakan oleh semua masyarakat miskin.

Kata kunci: *Bantuan Stimulan Rumah Swadaya, Rumah tidak layak huni, Kemiskinan ekstrim, Masyarakat berpenghasilan rendah*

1. PENDAHULUAN

Rumah menjadi salah satu kebutuhan dasar yang bukan memiliki fungsi fisik untuk melindungi orang-orang dari gangguan yang berasal dari luar rumah, namun juga memiliki fungsi non fisik untuk bisa menjamin kelangsungan hidup masyarakat [1]. Rumah sebagai salah satu kebutuhan utama yang dibutuhkan masyarakat, namun dalam pemenuhannya masih mengalami permasalahan. Permasalahan yang muncul pun besar dikaitkan karena perkembangan yang terjadi pada suatu wilayah atau kawasan, seperti Kota Palembang.

Palembang merupakan salah satu kota besar dan tergolong sebagai kota metropolitan. Permasalahan yang berkaitan dengan pemukiman penduduk di kota Palembang pun sering kali menjadi sorotan dan topik pembahasan utama. Palembang bisa dikatakan sebagai wilayah yang sangat padat. Masih banyak dibeberepa bagian tempat di kota Palembang yang bisa dikategorikan sebagai permukiman kumuh. Untuk kondisi rumah yang ditempati masyarakat pun bisa dikategorikan sebagai Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

Permasalah pemukiman dan RTLH yang terjadi di kota Palembang disebut juga dengan backlog/kekurangan rumah yang utamanya dirasakan oleh masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Jumlah RTLH di kota Palembang berjumlah 8.041 rumah [2]. RTLH dapat membawa masalah terhadap permasalahan lingkungan yaitu salah satunya pencemaran air dan bertambahnya limpasan air yang dapat menimbulkan pertambahan limpasan ke badan air [3]. Merespon kondisi penduduk miskin yang dikaitkan dengan RTLH maka, Balai Pelaksana dan Penyediaan Perumahan Sumatera V mengembangkan program Bantuan Stimulan Rumah Swadaya (BSPS) yang diperuntukkan bagi MBR untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan masyarakat dalam peningkatan kualitas rumah menjadi layak huni [4-6]. Program tersebut sesuai dengan amanat dari Pasal 5 ayat (1) UU No. 4 Tahun 1992 yaitu setiap warga negara mempunyai hak untuk menempati dan atau menikmati dan atau memiliki rumah yang layak dengan lingkungan yang sehat [7,8].

Tingkat kesejahteraan suatu masyarakat juga dapat dilihat dari segi pendapat seorang kepala keluarga dalam menghidupi keluarganya [9]. Salah satu faktor dalam kesejahteraan rakyat yaitu perumahan dan lingkungan dimana hasil penelitian Sarbani, dkk (2022) [10] menyebutkan bahwa dari hasil analisis regresi, tingkat kemiskinan sangat berpengaruh signifikan terhadap pembangunan rumah layak huni. Oleh karena itu, prioritas dalam mengembangkan program BSPS ini dilakukan dalam mendukung penanganan kemiskinan ekstrem dan stunting. Kategori masyarakat miskin ekstrem adalah individu dengan kemampuan konsumsi maksimal kurang lebih Rp. 45.000,00 per hari (Rp. 1,35 juta/bulan). Untuk kategori ini penanganan RTLH dilakukan melalui Bantuan Rumah Swadaya Sejahtera untuk MBR Desil 1. Kemudian untuk penanganan mengurangi resiko stunting dilakukan perbaikan kualitas rumah terutama aspek ketersediaan air minum dan sanitasi layak (beserta ketahanan dan kenyamanan bangunan).

Pembiayaan pembangunan RTLH bagi MBR dapat bersumber dari dana APBN, APBD dan lembaga lainnya seperti CSR, namun hal tersebut perlu menggunakan dan menerapkan kebijakan khusus yang terkait dengan sistem pembiayaan dan pembangunan RTLH seperti yang telah dilakukan oleh beberapa negara Asia lainnya [11].

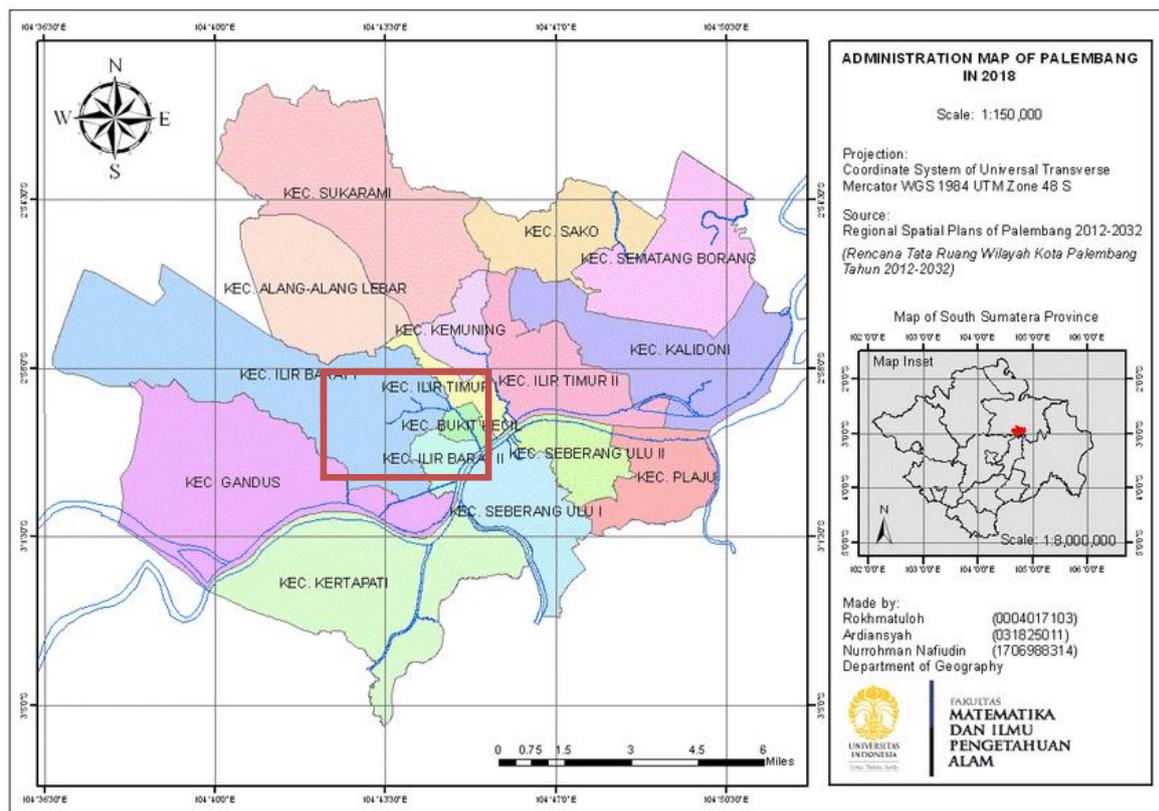
Berdasarkan uraian sebelumnya, pentingnya rumah yang layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah agar terjadi peningkatan kesejahteraan dan kualitas masyarakat. Pada makalah ini ini memiliki tujuan untuk mengkaji dan mengidentifikasi Program Prioritas BSPS dalam pengaruhnya terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Kemas Rindo, Kecamatan Kertapati Kota Palembang.

2. METODE/PERANCANGAN PENELITIAN

Lokasi penelitian berada di Kelurahan Kemas Rindo, Kecamatan Kertapati, Kota Palembang. Data yang digunakan berupa data primer yaitu jumlah dan kondisi eksisting RTLH yang teridentifikasi, sedangkan data sekunder berasal dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Data tersebut merupakan data RTLH yang ada di Kota Palembang tepatnya selama tahun 2022. Selanjutnya data tersebut di analisis menggunakan analisa deskriptif kuantitatif yang nantinya akan menunjukkan sebaran RTLH yang telah ada di kota Palembang. Data pendukung lainnya diperoleh dari hasil survei dan observasi lapangan untuk memperoleh dokumentasi kondisi rumah di lokasi penelitian yang ditinjau berdasarkan jenis dan jumlah mata pencarian penduduk.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil penelusuran diperoleh bahwa administrasi Kota Palembang pada Gambar 1 memiliki 18 kecamatan salah satunya Kecamatan Kertapati.



Gambar 1. Peta administrasi Kota Palembang

Berdasarkan Tabel 1, masyarakat di Kecamatan Kertapati khususnya di Kelurahan Kemas Rindo memiliki Rumah Tidak Layak Huni berjumlah 216 unit rumah. Kemas Rindo bukan menjadi Kelurahan yang memiliki RTLH terbanyak, masih ada Karya Jaya yang memiliki jumlah RTLH terbanyak yakni 351 unit rumah tidak layak huni.

Tabel 1. Jumlah RTLH di Kecamatan Kertapati

No	Nama Kelurahan	Jumlah RTLH
1	Kemas Rindo	216
2	Kemang Agung	45
3	Ogan Baru	301
4	Karya Jaya	351

Berdasarkan data dari Disperkim, Sumatera Selatan jumlah RTLH yang ada di Kota Palembang dimana Kecamatan Kertapati memiliki RTLH terbanyak dengan persentase 23,28%. Kecamatan Kertapati itu sendiri merupakan daerah yang dekat dengan aliran Sungai Musi sehingga jenis perumahannya pun masih jenis non permanen yang dianggap tidak layak huni. Hal itu serupa dengan keadaan permukiman di Kelurahan Kemas Rindo.

Permukiman yang berada di Kelurahan Kemas Rindo (Gambar 2), Kecamatan Kertapati terbagi dari beberapa RT dan RW yang ada sebanyak 8 RW sedangkan RT sebanyak 40 RT yang terletak di atas wilayah seluas 3027 hektar. Untuk jumlah penduduk di Kelurahan Kemas Rindo berjumlah 15.956 jiwa [12]. Jika dilihat dari jumlah penduduknya, maka tingkat kepadatan di daerah ini sangat jelas terlihat. Terlebih lagi jalan yang menjadi akses warga sekitar terbilang kecil dan sempit.



Gambar 2. Permukiman di Kelurahan Kemas Rindo, Kecamatan Kertapati

Kondisi jalan di Kelurahan Kemas Rindo (Gambar 3) mempunyai akses jalan yang sempit dan ada yang beberapa jalan yang rusak. Jalan di Kelurahan ini juga sudah banyak yang berlubang apalagi ketika musim hujan dan terjadi banjir. Masyarakat banyak yang mengeluh akibat kondisi ini, dikarenakan bisa membahayakan pengendara yang melintas.



Gambar 3. Kondisi Jalan di Kelurahan Kemas Rindo, Kecamatan Kertapati

Drainase pada pemukiman ini tidak berfungsi dengan baik sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Berdasarkan Tahun 2022 ini, Kelurahan Kemas Rindo masih mengalami permasalahan pada sistem drainasenya. Drainase pada Kelurahan Kemas Rindo tidak bisa menampung debit air yang normal, terlebih lagi masih banyak sampah masyarakat yang berserakan. Sistem drainasenya juga tidak bisa menampung volume air yang tinggi akibat curah hujan, sehingga terjadi banjir yang menyebabkan bisa mengganggu aktivitas masyarakat [13].

Dari keseluruhan penduduk di Kelurahan Kemas Rindo Kecamatan Kertapati Kota Palembang mempunyai mata pencarian, terlihat bahwa sebagian besar penduduknya berkerja sebagai Buruh dengan jumlah 8.495 orang, PNS 260 orang, wiraswasta 421 orang, pensiunan 200 orang. Berdasarkan kelompok mata pencaharian tersebut, di Kelurahan Kemas Rindo didominasi oleh masyarakat dengan mata pencaharian sebagai Buruh. Dalam hal ini, Buruh adalah salah satu pekerjaan yang bisa mengkategorikan masyarakat di Kelurahan Kemas Rindo sebagai Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Dimana, sasaran atau fokus dari Program BSPS dalam penanganan RTLH adalah diperuntukkan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Program BSPS dalam Penanganan RTLH dan Kemiskinan Ekstrem di Kelurahan Kemas Rindo, Kecamatan Kertapati Kota Palembang merupakan salah satu program pengentasan kemiskinan ekstrem dan stunting yang pelaksanaannya dilimpahkan pada salah satu instansi pemerintah yaitu Balai Pelaksana dan Penyediaan Perumahan Sumatera V dan berkolaborasi dengan Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Selatan. Indikator-indikator yang sudah dijelaskan dalam Tinjauan Pustaka yang utamanya mengukur tingkat

kemiskinan masyarakat. Maka, Program BSPS dalam penanganan RTLH di Kelurahan Kemas Rindo, Kecamatan Kertapati memberikan bantuan berupa peningkatan kualitas rumah swadaya untuk bisa memberikan penyediaan rumah layak huni sederhana yang terintegrasi.

Tabel 2. Jumlah RTLH di Kecamatan Kota Palembang

KECAMATAN	Jumlah RTLH
ILIR BARAT II	1043
SEBERANG ULU I	1864
SEBERANG ULU II	1210
ILIR BARAT I	186
ILIR TIMUR I	338
ILIR TIMUR II	424
SUKARAMI	296
SAKO	318
KEMUNING	83
KALIDONI	701
BUKIT KECIL	422
GANDUS	1239
KERTAPATI	3366
PLAJU	760
ALANG-ALANG LEBAR	117
SEMATANG BORANG	108
JAKABARING	1473
ILIR TIMUR TIGA	511

Dari beberapa Kecamatan di Kota Palembang, Kecamatan Kertapati dinobatkan sebagai kecamatan dengan jumlah RTLH terbanyak dibandingkan kecamatan lainnya dengan kepadatan penduduk yang lumayan tinggi. Hal lain yang mendorong perlunya Program BSPS dilaksanakan di Kelurahan ini yaitu banyak permasalahan yang terjadi seperti halnya kemiskinan dikarenakan masih banyak masyarakat yang bekerja sebagai Buruh atau bahkan tidak bekerja, kemudian permasalahan lingkungan yang berkaitan dengan akses jalan yang rusak serta drainase yang tidak bisa berfungsi dengan baik. Dalam penuntasan kemiskinan ekstrem dan RTLH yang ada di Kelurahan Kemas Rindo, maka sudah dilakukan pembangunan sebanyak 53 Unit rumah swadaya. Kemudian wujud bantuan lain yang berkaitan dengan lingkungan masyarakat adalah pembuatan jalan lingkungan sepanjang 917 meter (Gambar 4). Tentunya program bantuan ini dilakukan sebagai wujud pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan bagi masyarakat miskin secara umum serta untuk mengurangi jumlah pemukiman kumuh di Kelurahan Kemas Rindo.



Gambar 4. Hasil Pembangunan Rumah Swadaya beserta Jalan Lingkungan di Kelurahan Kemas Rindo

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa, dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Kemas Rindo dapat dilihat beberapa implementasi yang sudah berjalan dari Program BSPS. Program BSPS dalam meningkatkan kualitas rumah swadaya di Kelurahan Kemas Rindo, Kertapati sudah berjalan dengan baik. Hal ini terlihat pada tahapan implementasi yang sudah berjalan. Terlebih lagi, sudah tersedianya 53 Unit rumah layak huni yang disediakan untuk masyarakat di Kelurahan Kemas Rindo. Bukan hanya peningkatan kualitas rumah yang dilakukan. Namun juga, dilakukan wujud bantuan yang lain seperti pembangunan jalan lingkungan yang merupakan salah satu prasarana masyarakat untuk bisa melakukan akses perjalanan dengan baik. Dampak lingkungan yang bisa dirasakan dengan dilakukannya peningkatan kualitas rumah tida layak huni menjadi layak huni adalah dengan berkurangnya pemukiman kumuh yang berdampak negatif atau bahkan membahayakan Kesehatan masyarakat sekitar.

Adapun saran untuk penelitian selanjutnya adalah Kepada Pemerintah untuk bisa mempertahankan kuantitas dan kualitas program Bantuan BSPS dalam penanganan RTLH, sehingga dampak positif dari adanya bantuan ini bisa dirasakan oleh semua masyarakat miskin atau MBR. Kolaborasi yang baik antara Balai Pelaksana dan Penyediaan Perumahan Sumatera V dan Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Selatan diharapkan bisa dipertahankan dan ditingkatkan supaya bukan hanya mendukung Rumah Layak Huni tapi juga sarana prasarana lingkungan sekitarnya. Diperlukan kajian mengenai resiko stunting dalam mendukung program RTLH selanjutnya menggunakan metode matriks probabilitas (frekuensi) dan dampak (severity values) faktor resiko [14]. Membuat rencana sumber daya aparatur sebagai tenaga teknis dan tenaga pengawas agar program yang direalisasikan dapat berjalan dengan optimal dan dirasakan oleh MBR [15].

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Selatan yang telah membantu dalam pengambilan dan pengumpulan data primer dan data sekunder.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Mundok, Z., Rotinsulu, T., Masloman, I., “Pengaruh Pembangunan Rumah Tinggal layak Huni (RTLH) Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Bolaang UKI Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan,” *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, vol. 22, no 3, 2022,
- [2] BKKBN, 2022. *Perhitungan Backlog Provinsi Sumsel*. Jakarta: BKKBN.
- [3] Firda, A., and Fikri, A., “Analisis Penetapan Harga Jual Unit Rumah dengan Metode Analisa Titik Impas (Perumahan Bukit Sentosa Residence & Griya Revari Indah)”, *Jurnal Deformasi*, vol. 3(2), pp. 64-73, 2018, <https://doi.org/10.31851/deformasi.v3i2.2320>.
- [4] SE Dirjen Perumahan No. 14/2022 tentang Juknis Penyelenggaraan Program BSPS
- [5] Badan Pusat Statistik. (2022). *Badan Pusat Statistik Kota Palembang Tahun 2022*
- [6] Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.
- [7] Satrio, T., “Analisis dan Evaluasi Sistem Drainase Untuk Mengatasi Kebanjiran Pada Kawasan Kelurahan Kemas Rindo Kecamatan Kertapati Palembang,” *Skripsi, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah*, 2020.
- [8] Kurniawan, B., Anggraini, B.L., “Evaluasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Tuban,” *Publika*, vol. 9, no. 2, pp. 309-322, 2021, <https://doi.org/10.26740/publika.v9n2.p309-322>.
- [9] Lestari, E., “Penerapan Konsep Zero Runoff Dalam Mengurangi Volume Limpasan Permukaan (Perumahan Puri Bali, Depok)”, *FORUM MEKANIKA*, vol. 5, no. 1, pp. 27-34, 2016, <https://doi.org/10.33322/forummekanika.v5i1.638>.
- [10] Sarbaini, S., Zukrianto, Z., and Nazaruddin, N., “Pengaruh Tingkat Kemiskinan Terhadap Pembangunan Rumah Layak Huni Di Provinsi Riau Menggunakan Metode Analisis Regresi Sederhana”, *Jurnal Teknologi dan Manajemen Industri Terapan*, vol. 1(3), pp. 131-136, 2022, <https://doi.org/10.55826/tmit.v1i3.46>.
- [11] Akhirini, A., and Umari, Z. F., “Identification of Risk Factors for The Implementation Stage of Toll Road Construction in Public-private Cooperation Using the BOT (Build Operate Transfer) System,” *J. Civil Eng. Building and Transportation*, vol. 7(1), pp. 146-150, 2023, [10.31289/jcebt.v7i1.8965](https://doi.org/10.31289/jcebt.v7i1.8965).
- [12] Muhtadi, T. Y., “Implementasi Kebijakan Program Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kota Tangerang,” *Pelita: Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah*, vol. 20(2), pp. 188-197, 2020, <https://doi.org/10.33592/pelita.Vol20.Iss2.821>.
- [13] Tursilarini, T. Y., and Udiati, T., “Dampak Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi Kesejahteraan Sosial Keluarga Penerima Manfaat di Kabupaten Bangka,” *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, vol. 44(1), pp. 1-21, 2020, <https://doi.org/10.31105/mipks.v44i1.1973>.
- [14] Ihwan, M., Fadillah, C., Hidayah, S. N., and Sumardiana, B., “Pemenuhan Hak Atas Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin”, *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI*, vol. 5(1), pp. 89-101, 2022, <https://doi.org/10.15294/jphi.v5i1.50011>.

- [15] Desyra, T. E., Dengo, S., and Londa, V., “Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Dalam Penyediaan Rumah Layak Huni Di Desa Tolok Satu Kecamatan Tompaso Kabupaten Minahasa,” *Jurnal Administrasi Publik*, vol. 7(110). 2021.